

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN
DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA
MODAL DI KABUPATEN/KOTA PADA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2015-2020**

SKRIPSI

**YOGIE ROWANDHA
NIM : 166122195**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA
ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL DI
KABUPATEN KOTAPADA PROVINSI KEPULAUAN
RIAU TAHUN 2015-2020**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh

**YOGIE ROWANDHA
NIM : 166122195**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA
ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL DI
KABUPATEN/KOTA PADA PROVINSI KEPULAUAN
RIAU TAHUN 2015-2020

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh :

NAMA : YOGIE ROWANDHA
NIM : 16622195

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



Andres Putranta Sitepu, S.E., M.Ak
NIDK. 8854290019 / Asisten Ahli



Maryati, S.P., M.M
NIDN. 1007077101 / Asisten Ahli

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Hendy Satria, S.E., M.Ak
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA
ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL DI
KABUPATEN/KOTA PADA PROVINSI KEPULAUAN
RIAU TAHUN 2015-2020

Yang dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : YOGIE ROWANDHA
NIM : 16622195

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Lima Belas Agustus Dua Ribu Dua Puluh Dua dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,



Andres Putranta Sitepu, S.E., M.Ak
NIDK. 8854290019 / Asisten Ahli

Sekretaris,



Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 1004117701 / Asisten Ahli

Anggota,



Novi Chandra Saputra, S.E., M.Ak
NIDN.8968410021

Tanjungpinang, 15 Agustus 2022
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,



Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Yogie Rowandha
NIM : 16622195
Tahun Angkatan : 2016
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.34
Program Studi /Jenjang : Akuntansi Strata – I (Satu)
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Pada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila terdapat dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 22 Agustus 2022

Penyusun,



YOGIE ROWANDHA

NIM : 16622195

HALAMAN PERSEMBAHAN



alhamdulillah hirobbil 'alamin, Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala nikmat yang diberikan untuk penulis, sehingga tiada alasan untuk penulis berhenti bersyukur

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk orang-orang yang aku cintai dan aku sayangi:

“Kedua orangtuaku”

Ucapan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan doa, semangat, pengorbanan, dukungan, nasehat, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.

“Kakak dan Abang”

Ucapan terima kasih kepada atas semua doa, semangat, dukungan, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.

“Almamaterku tercinta”

STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG tempat aku menuntut ilmu

HALAMAN MOTTO

يُسْرًا أَلْهَسِرِ مَعَ فَاِنَّ

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah :5)

Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa.

Selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Rabb Yang Maha Kuasa Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015-2020”**. Shalawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman yang selalu berjuang mengikuti risalahnya, dan semoga kita termasuk di antara mereka, umat yang selalu memperjuangkan dan menegakkan islam dan mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana (S1) Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

3. Ibu Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si., CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ilyas, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Bapak Andres P. Sitepu, S.E., M.Ak selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran, serta membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Maryati, S.P., M.M selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran, serta membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen beserta Staf Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang baik dan sabar dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan bantuan yang diberikan.
9. Pimpinan dan Staf BPKAD Provinsi Kepulauan Riau yang telah memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Kedua orangtua tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan setiap saat.
11. Sahabat-sahabat sedari dulu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih selalu memberikan motivasi serta dukungan.
12. Teman-teman Akuntansi angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini.

Semoga apa yang penulis tuangkan dalam skripsi ini dapat menambah informasi dan bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang membangun dan demi kesempurnaan merupakan harapan penulis dari pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih

Tanjungpinang, Agustus 2022

Penulis

YOGI ROWANDHA

NIM : 16622195

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Batasan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Kegunaan Penelitian	10
1.5.1 Kegunaan Teoritis	10
1.5.2 Kegunaan Praktis	10
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teori.....	13
2.1.1 Belanja Modal	13
2.1.1.1 Peran Belanja Modal.....	16
2.1.1.2 Jenis-Jenis Belanja Modal	17
2.1.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	

Belanja Modal	18
2.1.2 Dana Alokasi Umum	23
2.1.2.1 Pengertian Dana Alokasi Umum.....	23
2.1.2.2 Keuntungan Perhitungan Dana Alokasi Umum	26
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	27
2.3 Kerangka Pemikiran	28
2.4 Hipotesis	29
2.5 Peneliti Terdahulu.....	30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Jenis Data.....	33
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	34
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	34
3.5 Populasi Dan Sampel	36
3.4.3 Populasi.....	36
3.4.4 Sampel.....	37
3.4 Metode Analisis Data.....	37
3.4.1 Uji Asumsi Klasik.....	38
3.4.1.1 Uji Normalitas.....	38
3.4.1.2 Uji Multikolinearitas.....	40
3.4.1.3 Uji Heteroskedasitas	40
3.4.1.4 Uji Autokorelasi	42
3.4.2 Uji Hipotesis	42
3.4.2.1 Uji Pengaruh Parsial (Uji t).....	42
3.4.2.2 Uji Pengaruh Simultan (Uji F).....	43
3.4.2.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	46
4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Riau	46
4.1.1.1 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	48
4.1.2 Penyajian Data	49
4.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Kepulaua Riau	49
4.1.2.2 Dana Alokasi Umum Pemerintah Provinsi Kepulaua Riau	52
4.1.2.3 Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kepulaua Riau	54
4.1.3 Hasil Analisis Data	57
4.1.3.1 Uji Asumsi Klasik	57
4.1.3.1.1 Hasil Uji Normalitas	57
4.1.3.1.2 Hasil Uji Multikolinearitas	59
4.1.3.1.3 Hasil Uji Heteroskedasitas	60
4.1.3.1.4 Hasil Uji Autokorelasi	63
4.1.3.3 Hasil Uji Hipotesis	64
4.1.3.3.1 Hasil Uji Signifikasi Parsial (Uji T) .	64
4.1.3.3.2 Hasil Uji Signifikasi Simultan (Uji F)	66
4.1.3.3.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	67
4.2. Pembahasan	76
4.2.1 Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal	76
4.2.2 Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal	77
4.2.3 Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Modal	79

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1	Besaran Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Periode 2015-2020.....	6
2	Proporsi DAU	26
3	Definisi Operasional Variabel.....	34
4	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau Periode 2015-2020.....	50
5	Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Kepulauan Riau Periode 2015-2020.....	53
6	Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Kepulauan Riau Periode 2015-2020.....	55
7	Uji Normalitas <i>Kolmogorov Smirnov</i>	59
8	Uji Multikolinearitas	60
9	Uji Heteroskedastisitas Glejser	62
10	Uji Autokorelasi	63
11	Uji Parsial (Uji t).....	64
12	Uji Simultan (Uji F)	66
13	Uji Koefisien Determinasi.....	67

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pemikiran.....	29
2	Normalitas Histogram.....	57
3	Normalitas P Plots.....	58
4	Uji Normalitas P-Plot.....	44
5	Uji Heteroskedasitas.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
Lampiran 1	: Hasil Pengolahan SPSS
Lampiran 2	: Rekap PAD, DAU, dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Peiode 2015-2020
Lampiran 3	: Persentase Plagiat
Lampiran 4	: Surat Pernyataan Selesai Penelitian

ABSTRAK

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015-2020

Yogi Rowandha 16622195. Akuntansi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
Email :

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal Provinsi Kepulauan Riau. penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk-bentuk angka, meskipun juga berupa data kualitatif sebagai pendukungnya.

Dalam rangka memberikan gambaran yang jelas, logis dan akurat mengenai hasil pengumpulan data, data yang diperoleh dihimpun berupa data yang didapat melalui dokumentasi dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal sedangkan Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah (X1) dan dana alokasi umum (X2) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen belanja modal (Y). DAU yang bersifat block grant dengan kata lain penggunaannya diserahkan kepada daerah untuk kebutuhan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah. Pada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hasil yang di peroleh mengindikasi DAU digunakan untuk belanja rutin seperti belanja pegawai.

Pemerintah provinsi Kepulauan Riau kedepannya diharapkan lebih meningkatkan proporsi dana alokasi umum (DAU) terhadap pengalokasian belanja modal. Pemerintah provinsi Kepulauan Riau hendaknya mengurangi aktivitas belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa dan lebih meningkatkan aktivitas belanja modalnya

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal

Dosen Pembimbing I : Andres P. Sitepu, S.E., M.Ak

Dosen Pembimbing II : Maryati, S.P.,M.M

ABSTRACT

THE EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD) AND GENERAL ALLOCATION FUND (DAU) ON CAPITAL EXPENDITURE IN DISTRICT/CITYIN RIAU ISLANDS PROVINCE 2015-2020

Yogi Rowandha 16622195. Akuntansi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
Email :

The purpose of this study was to determine the effect of Regional Original Income (PAD) and General Allocation Funds (DAU) on capital expenditures of the Riau Islands Province. This research is a quantitative research, namely research on data collected and expressed in the form of numbers, although it is also in the form of qualitative data to support it.

In order to provide a clear, logical and accurate picture of the results of data collection, the data obtained were collected in the form of data obtained through documentation and literature study.

The results showed that partially local revenue has a positive and significant effect on capital expenditures, while general allocation funds have no effect on capital expenditures. Regional original income (X1) and general allocation funds (X2) together (simultaneously) affect the dependent variable of capital expenditure (Y). DAU which is a block grant in other words its use is left to the regions for regional needs and the implementation of regional autonomy. In the Riau Islands Provincial Government, the results obtained indicate that the DAU is used for routine expenditures such as personnel expenditures.

The Riau Islands provincial government in the future is expected to further increase the proportion of general allocation funds (DAU) to the allocation of capital expenditures. The Riau Islands provincial government should reduce personnel expenditure activities, and goods and services expenditures and further increase its capital expenditure activities.

Keywords : Internal Audit, Internal Control, Credit Sales.

Advisor I : Andres P. Sitepu, S.E., M.Ak

Advisor II : Maryati, S.P.,M.M

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah yang mulai berlaku sejak tahun 1999 menyebabkan terjadinya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah kini memiliki kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan serta program pembangunan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah setempat. Oleh karena itu salah satu kunci yang harus diperhatikan dalam desentralisasi adalah pemerintah daerah harus lebih responsif terhadap kebutuhan penduduknya sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan di daerah (Jolianis, 2016). Pemberlakuan desentralisasi fiskal ini berawal dari terpuruknya perekonomian negara pada saat krisis ekonomi di tahun 1997. Pemerintah ingin melepas sebagian wewenang pengelolaan keuangan kepada daerah. Dengan harapan agar daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat atas dasar kemampuan sendiri. Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan Pemerintah Daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah, kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif, dan meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Otonomi daerah menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah

serta memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif di daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, APBD menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. APBD memuat pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD mencerminkan kondisi keuangan suatu Pemerintah Daerah. Pada sisi pendapatan, dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan dapat dilihat tingkat kemandirian suatu daerah, dimana semakin tinggi nilainya semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerahnya. Dengan tingginya tingkat kemandirian suatu daerah sehingga pemerintah daerah dapat leluasa mengalokasikan dana untuk pembangunan daerah melalui belanja modal. Dari sisi pengeluaran dapat dilihat kecendrungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur, seperti belanja pegawai.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana yang di gunakan untuk masing- masing program kegiatan. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat

mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif (belanja modal). Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Halim, 2012).

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Dalam pengalokasian belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung wajib dikelola secara efektif dan efisien dan pengelolaan ini nantinya akan menjadi nilai bagi pengelola daerah dalam melaksanakan kebijakan publik. Pengelolaan keuangan daerah sendiri akan diwujudkan dalam pendistribusian anggaran yang diberikan dalam bentuk alokasi belanja modal pada postur APBD, nantinya anggaran ini akan dijalankan dalam pembelian aset tetap. Untuk belanja aset ini secara umum akan dilakukan dalam periode jangka panjang dan menengah yang nantinya akan anggarannya akan berubah bentuk dari anggaran belanja modal menjadi anggaran belanja operasional yang secara berkala dilakukan dalam perawatan aset (Kosim, 2017).

Kusuma (2013) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja daerah hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Kosim (2017),

menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Felix (2012) berpendapat bahwa Pemerintah Daerah semestinya dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan belanja rutin yang relatif kurang produktif. Ketiga pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja daerah dalam hal ini belanja modal untuk berbagai kepentingan publik .

Pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai sumber penerimaan yang didapat langsung dari daerah sesuai potensi yang dimiliki oleh daerah. Penerimaan ini dialokasikan untuk pemerintah daerah dalam rangka menjaga otonomi daerah dalam memaksimalkan potensi penerimaan dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah secara mandiri. Sehingga jika Pemerintah Daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka Pemerintah Daerah harus berusaha keras untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebesar-besarnya. Penganggaran belanja untuk kebutuhan pembelian asset wajib dilakukan dengan menyesuaikan keperluan daerah mengacu pada potensi penerimaan yang dimilikinya. Nantinya nilai anggaran ini akan mengacu pada nilai penerimaan daerah dalam bentuk PAD. Oleh karenanya dalam peningkatan pelayanan publik akan dilakukan peningkatan pula pada nilai belanja asset yang dianggarkan pemerintah daerah. Dengan dasar ini pemerintah harus terus menggali potensi yang bisa diterima daerah guna peningkatan belanja modal dalam mensejahterakan public melalui pelayanan public.

Penelitian yang dilakukan oleh Arwati & Hadiati (2013), Sugiardi & Supadmi (2014) dan Jaya & Dwirandra (2014) menemukan bukti empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berbeda dengan Sugiardi & Supadmi (2014) dan Jaya & Dwirandra (2014), penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) menunjukkan bahwa tidak terdapatnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

Daerah memiliki kondisi yang berbeda dalam melakukan penganggaran kegiatan operasionalnya, hal ini membuat perbedaan yang mencolok pada setiap daerah. Dalam menyelesaikan masalah ini pemerintahan tingkat pusat melakukan transfer dana yang disebut Dana Alokasi Umum (DAU). DAU sendiri didapat dari anggaran pemerintah pusat dalam struktur APBN yang dilakukan dalam menjaga ketimpangan fiskal antar daerah dalam membiayai kegiatan operasionalnya. Dengan adanya kebijakan dana ini maka akan tercipta pelayanan public yang lebih maksimal.

Penelitian yang dilakukan Wulandari, dkk (2013) dan Sugiardi & Supadmi (2014) menemukan bukti empiris Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) memperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Sedangkan penelitian Arwati & Hadiati (2013) menemukan bukti empiris bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini terjadi disebabkan Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah hanya diperuntukan untuk membiayai pengeluaran rutin,

seperti untuk belanja pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi yang mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dalam rangka melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pengelolaan keuangan untuk daerahnya sendiri. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja lainnya.

Salah satu dana perimbangan dari pemerintah adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 23/2014), melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dengan adanya transfer dana dari pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) ini, diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Berikut adalah data besaran Pendapatan asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja modal Provinsi Kepulauan Riau periode 2015-2020.

Tabel 1.1
Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal Provinsi Kepulauan Riau Periode 2015-2020

Tahun	PAD (Rp)	DAU (Rp)	Belanja Modal (Rp)
2015	1,579,614,558,899.78	2,082,937,645,000	1,321,156,298,880.30
2016	1,719,661,699,892.97	2,970,436,214,000	1,673,604,202,335.03
2017	1,919,094,723,354.18	2,698,204,614,524	1,609,664,498,288.06
2018	1,993,932,795,317.53	2,940,461,900,277	1,628,706,693,263.79
2019	2,155,777,869,975.73	3,359,043,733,000	2,144,694,752,536.88
2020	1,717,956,280,162.79	3,220,167,598,000	1,257,233,717,599.28

Sumber : BPKP Provinsi Kepulauan Riau (2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 2015-2020 mengalami pasang surut. Pada tahun 2016 PAD naik sebesar 8,87% dibanding tahun sebelumnya, pada tahun 2017 PAD Provinsi Kepulauan Riau kembali naik sebesar 11,60% dibanding tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2018 PAD Provinsi Kepulauan Riau naik sebesar 3,90%, dan terus naik di tahun 2019 sebesar 8,12%, namun pada tahun 2020 diakibatkan kondisi perekonomian yang menurun dikarenakan pandemi covid 19 PAD Provinsi Kepulauan Riau turun hingga 20,31%. Hal ini serupa dengan Dana Alokasi Umum yang didapat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode 2015-2020. Sepanjang rentang waktu jumlah Dana Alokasi Umum yang diterima berfluktuasi yakni pada tahun 2016 naik sebesar 9,16% dibanding tahun sebelumnya, tahun 2017 turun sebesar 9,16% dibanding tahun sebelumnya, tahun 2018 naik 8,98% dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2019 kembali naik

sebesar 14,24%, namun turun di tahun 2020 sebesar 4,13%. Dari jumlah PAD dan DAU yang didapatkan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau jumlah alokasi terkait kegiatan belanja modal periode 2015-2017 mengalami kenaikan, di tahun 2016 nilai belanja modal naik sebesar 26,68%, namun turun sebesar 3,82% di tahun 2017, kembali naik pada tahun 2018 sebesar 1,18%, terus naik di tahun 2019 sebesar 31,68%, namun turun signifikan di tahun 2020 sebesar 41,38%.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana yang di gunakan untuk masing-masing program kegiatan. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif.

Namun faktanya Pemerintah Daerah dalam pengalokasian pendapatan daerah cenderung menggunakan untuk keperluan belanja rutin dari pada belanja modal. Belanja Modal adalah salah satu kelompok dari belanja daerah yang digunakan dalam pembelian dan penyediaan barang berwujud memiliki daya guna satu tahun lebih yang dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik. Belanja Modal dalam pemahamannya berhubungan dengan upaya pemerintah untuk menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Belanja modal memiliki peran yang sangat penting karena belanja modal memiliki manfaat dalam bentuk jangka panjang yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara luas.

Kegiatan belanja (pengeluaran) Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Untuk membiayai pengeluaran tersebut maka dibutuhkan sumber-sumber penerimaan. Sumber penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi umum. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.

Dari uraian latar belakang diatas dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya maka dilakukan penelitian apakah pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan alasan tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **”Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020“**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Provinsi Kepulauan Riau?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Provinsi Kepulauan Riau?

3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal pada Provinsi Kepulauan Riau?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini ditujukan agar peneliti fokus pada masalah yang akan diteliti dan tidak menyimpang pada pembahasan lainnya. Penelitian ini terbatas pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal di Kabupaten/Kota Pada Provinsi Kepulauan Riau periode 2015-2020.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Provinsi Kepulauan Riau?
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Provinsi Kepulauan Riau?
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum secara simultan terhadap Belanja Modal pada Provinsi Kepulauan Riau?

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Secara ilmiah penelitian ini akan berguna untuk perkembangan ilmu manajemen seperti menguatkan teori, mengembangkan teori bahkan membantah teori, dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya materi dan menambah informasi mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal.

1.5.2 Kegunaan praktis

1. Bagi Peneliti

Bagi penulis merupakan tanggung jawab akademik untuk mengembangkan ilmu yang telah di terima di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang dengan jalan memadukan antar teori dengan fakta yang diteliti.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan pikiran bagi pemerintah selaku pengambil kebijakan publik terkait anggaran khususnya tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal.

3. Bagi yang lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi para pencari kerja untuk memanfaatkan pengetahuan dan keterampilannya, untuk merintis usaha sesuai kemampuannya. Selain itu diharapkan dapat dijadikan informasi dengan

referensi bacaan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sejenis.

1.6 Sistematika Penulisan

Bagian utama skripsi dibagi secara logis dalam bab-bab dan sub bab tergantung pada sifat masalah yang diteliti. Secara konsisten pembagiannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum dari masalah penelitian yang dilakukan yang terdiri dari latar belakang permasalahan yang dijelaskan secara garis besar keterkaitan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup teori-teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan digunakan sebagai pedoman atau landasan konseptual dalam pemecahan masalah. Teori-teori ini diambil dari berbagai sumber dokumenter dan buku rujukan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis. Kemudian penulis akan melakukan pengolahan data sesuai teknik yang telah dijabarkan pada bab III.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan masalah sebelumnya, serta saran-saran mengenai perbaikan yang penulis lakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Permendagri No.77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, didefinisikan sebagai pihak yang berwenang dalam melaksanakan penataan keuangan daerah dengan aktifitas merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, menatausaha, melaporkan, mempertanggungjawabkan serta mengawasi jalannya pengelolaan keuangan di daerah agar berjalan sesuai perencanaan dan anggaran. Kegiatan ini akan melibatkan data, aliran data, dan data yang tersaji secara elektronik.

Pemerintah no 12 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan jika kegiatan mengelola keuangan daerah wajib dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan yang dibuat, dengan memerhatikan aspek ekonomi secara efektif, efisien dan akuntabel agar dapat secara transparan dipertanggungjawabkan kepada publik.

2.1.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

Menurut Halim & Kusufi (2017) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Menurut Arief (2018) APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Lanjutnya, anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat bantu untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah struktur dalam APBD terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Meliputi :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai peraturan daerah yang berlaku. Adapun kelompok PAD dipisahkan menjadi:

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

b. Pendapatan Transfer, terdiri dari

1) Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari:

a) Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi :

1. Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum)
2. Dana Transfer Khusus (Dana Alokasi Fisik dan Dana Alokasi Non Fisik)

b) Dana Insentif Daerah. Dana insentif daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria

tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian Kinerja tertentu.

- c) Dana Otonomi Khusus;
- d) Dana Keistimewaan; dan
- e) Dana Desa. Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

2) Transfer Antar Daerah, terdiri dari:

- a) Pendapatan Bagi Hasil; dan
- b) Bantuan Keuangan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri atas:

- 1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- 3) Hasil kerja sama daerah;
- 4) Jasa giro;
- 5) Hasil pengelolaan dana bergulir;
- 6) Pendapatan bunga;
- 7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- 8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat

penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

- 9) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) Pendapatan denda pajak daerah;
- 12) Pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) Pendapatan dari pengembalian;
- 15) Pendapatan dari BLUD; dan
- 16) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Meliputi :

- a. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

2.2.2 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan kegunaan lebih dari satu periode akuntansi (Halim, 2012). Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja modal adalah belanja Pemerintah Daerah yang kegunaannya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan daerah atau aset dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk mendapatkan aset tetap Pemerintah Daerah secara peralatan infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara memperoleh Belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan persyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan

sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan kegunaan lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap dan aset lainnya yang dimaksudkan mempunyai karakteristik berwujud, menambahkan aset pemerintahan, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya relatif material. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa suatu belanja yang dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap dan aset lainnya sehingga menambah aset lainnya.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batas minimal kapitalis aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah .
3. Perolehan aset tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Halim & Kusufi (2017) mengatakan bahwa belanja modal tidak dapat ditujukan kepada masyarakat rumah tangga atau perorangan. Dalam hal ini belanja modal merupakan salah satu indikator produktif dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah sehingga tidak dapat ditujukan kepada masyarakat perorangan atau rumah tangga karena dalam pelaksanaannya haruslah bersinggungan dengan pelayanan publik. Semakin besar persentase alokasi belanja modal menandakan bahwa pemerintah daerah lebih produktif. Hal ini

dikarenakan umumnya dalam penggunaan aset yang dihasilkan selalu bersinggungan dengan pelayanan publik dan digunakan oleh masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa alokasi belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga jumlah alokasi belanja modal setiap tahunnya harus relatif besar. Semakin besar alokasi belanja modal, maka pelayanan pemerintah daerah kepada publik dapat dikatakan meningkat, begitu juga sebaliknya.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) menyatakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut digunakan untuk operasional kegiatan sehari hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual (Mawarni, 2013)..

Berdasarkan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 53 ayat 2 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam Belanja Modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Kemudian pada pasal 53 ayat 4 menyebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar

pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disebutkan pada PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ini mengatur tentang aset tetap dimana Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

2.1.2.1 Peran Belanja Modal

Menurut PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Untuk memperoleh aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD). Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Untuk memperoleh aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD. Alokasi Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap awal tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Secara teoritis terdapat tiga cara dalam memperoleh aset tetap, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan dengan cara membeli. Adapun cara yang biasa dilakukan adalah dengan cara membeli melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

2.1.2.2 Jenis-jenis Belanja Modal

Menurut Yustikasari (2012), jenis-jenis belanja modal terdiri dari 5 kategori utama, yaitu:

1. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh untuk siap dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Perolehannya dengan cara mengeluarkan biaya harga pembelian

serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan.

2. Peralatan dan mesin merupakan mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh investasi kantor, dan peralatan lain yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari dua belas bulan serta dalam kondisi siap pakai. Hal-hal yang mengubah nilai peralatan dan mesin adalah penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama. Dalam pencatatannya harus dibuat ketentuan yang berbeda antara hal-hal yang mengubah nilai tersebut.
3. Gedung dan bangunan yaitu mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Hal-hal yang mengubah nilai gedung dan bangunan adalah penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
4. Jalan, irigasi dan jaringan yaitu aset yang dimiliki atau dikuasai pemerintah berupa jalan, irigasi, dan jaringan dalam keadaan siap pakai.
5. Aset tetap lainnya yaitu mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang telah disebutkan diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah kedalam kondisi siap pakai dengan masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap lainnya dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lain dan dari sitaan atau rampasan.

2.1.2.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal

Menurut Kosim (2017), Belanja Modal dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah dimana semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah biasanya akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal, tetapi menyesuaikan dengan kondisi daerah pada saat tahun anggaran. faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi Belanja Modal adalah pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan penelitian yang dilakukannya secara parsial dan simultan pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (Yustikasari, 2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal adalah DAU, PAD, DAK, dan Silpa (Kosim, 2017).

1. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Halim & Kusufi, 2017). Dari dua pendapat mengenai pengertian Pendapatan Asli Daerah di

atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri dimana dana yang diperoleh dikelola oleh pemerintah daerah dan jajarannya dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah berasal dari:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pajak pada setiap provinsi dan kabupaten/kota adalah berbeda. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Menurut UU tersebut, jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut:

1. Pajak kendaraan bermotor.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak kendaraan di atas air.
5. Pajak air di bawah tanah.
6. Pajak air permukaan.

Selanjutnya, jenis pajak Kabupaten/Kota tersusun atas:

1. Pajak Hotel.
2. Pajak restoran.
3. Pajak hiburan.
4. Pajak reklame.

5. Pajak penerangan jalan.
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C.
7. Pajak Parkir.
8. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah juga berperan sebagai penyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Pendapatan retribusi pada provinsi berbeda dengan kabupaten/kota, terkait dengan UU No. 34 Tahun 2000. Untuk Provinsi, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pengujian kapal perikanan. Selanjutnya, jenis pendapatan retribusi untuk Kabupaten/Kota meliputi obyek pendapatan adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP), retribusi penggantian biaya cetak akte catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi pelayanan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pengujian kapal perikanan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan, retribusi jasa usaha tempat pelelangan, retribusi jasa usaha terminal, retribusi jasa

usaha tempat khusus parkir, retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi jasa usaha penyedotan kakus, retribusi jasa usaha rumah potong hewan, retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal, jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga, retribusi jasa usaha penyebrangan di atas air, retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair, retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin trayek.

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Sebagian laba perusahaan daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan dan perbankan dan bidang lain, seperti jasa air bersih (PDAM), jasa di sektor industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

3. Penerimaan Lain-Lain Pengertian

Penerimaan lain-lain Daerah Kabupaten Dan Kota adalah penerimaan yang diperoleh daerah Kabupaten dan kota diluar pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Beberapa contoh penerimaan yang termasuk dalam ketegori penerimaan lain-lain misalnya penerimaan dan hasil penjualan aset milik pemerintah daerah dan jasa giro rekening pemerintah daerah kabupaten dan kota.

2.1.3 Dana Alokasi Umum

2.1.3.1 Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Harahap (2011), DAU adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka desentralisasi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan

kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Pemberian DAU kepada pemda merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemda. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (pemda), dan pemda secara leluasa dapat menggunakan DAU apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga akan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup lebih panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan standar kehidupan masyarakat (Yustikasari, 2012).

Menurut Mawarni (2013), Dana Alokasi merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan.

Dari dua pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana transfer dari pemerintah pusat yang berasal dari APBN dan dialokasikan kesetiap daerah dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dan belanja daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer yang bersifat *Block Grant* artinya penggunaannya diserahkan kepada daerah untuk peningkatan

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya antara provinsi dan kabupaten/kota.

Tahapan-Tahapan Menghitung Dana Alokasi Umum

1. Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula Dana Alokasi Umum dilakukan oleh tim independen dan berbagai universitas dengan tujuan memperoleh kebijakan perhitungan Dana Alokasi Umum yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia.

2. Tahapan administratif

Dalam tahapan ini Departemen Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar perhitungan Dana Alokasi Umum termasuk di dalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan data yang akan digunakan.

3. Tahapan Teknis

Merupakan tahapan pembuatan simulasi perhitungan Dana Alokasi Umum yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula Dana Alokasi Umum sebagaimana diamanatkan UU

dengan menggunakan data tersedia serta memperlihatkan hasil rekomendasi pihak akademis.

4. Tahapan Politis

Tahapan Politis merupakan tahap akhir. Pembahasan perhitungan Dana Alokasi Umum antara pemerintah dengan panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsolidasi dan mendapatkan persetujuan hasil perhitungan Dana Alokasi Umum.

2.1.3.2. Keuntungan Perhitungan Dana Alokasi Umum

Menurut Kosim (2017), keuntungan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten dan kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah daerah Kabupaten dan Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk kabupaten dan kota yang bersangkutan.
4. Porsi daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud diatas meruakan proporsi bobot daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Tabel 2.1
Proporsi DAU

Besarnya DAU	DAU Provinsi	DAU Kabupaten/Kota
26% x APBN	10% x 26% x APBN	90% x 26% x PDN

Sumber : (Jolianis, 2016)

$$\text{DAU Provinsi} = \frac{\text{Bobot Seluruh Provinsi Yang Bersangkutan}}{\text{Bobot Provinsi Yang Ada di Indonesia}} \times \text{DAU Provinsi}$$

DAU Kabupaten / Kota =

$$\frac{\text{Bobot Seluruh kabupaten kota Yang Bersangkutan}}{\text{Bobot Kabupaten kota Yang Ada di Indonesia}} \times \text{DAU Kabupaten Kota}$$

2.2 Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Desentralisasi mengakibatkan pemda wajib mampu menggali penerimaan daerah yang peruntukannya mendanai kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana. Menurut Halim & Kusufi (2017) desentralisasi untuk daerah dalam merancang dan mengelola keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, potensi sumber pendapatan dominan penyumbang Pendapatan Asli Daerah untuk rata-rata pemda Indonesia bersumber dari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Halim, 2012). Penelitian Susanti dan Fahlevi (2016), Purbarini and Masjojo (2015) menemukan bahwa PAD positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan penemuan sebelumnya, Jayadan Dwirandra (2014) menemukannya semakin besar PAD maka penerimaan tersebut digunakan dalam penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik sehingga besar juga Belanja Modalnya.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Adapun tujuan dari transfer salah satunya dalam bentuk Dana Alokasi Umum yaitu untuk mengurangi perbedaan keuangan dan kemampuan pendanaan antar daerah, dengan cara ini maka pemberian Dana Alokasi Umum antar daerah tidak sama jumlahnya. Daerah dapat memakai dana transfer yang berupa bantuan Dana Alokasi Umum yang digunakan untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan yang terbaik melalui Belanja Modal. Semakin besar DAU yang diberikan dari pusat, maka semakin besar juga penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik melalui Belanja Modal daerah. Dana Alokasi Umum dikelola secara penuh oleh pemerintah daerah didalam penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan suatu daerah. Penelitian Permatasari dan Mildawati (2016), Wahyuningsih dan Widaryanti (2015) dan Pentury (2011) menemukan DAU positif terhadap Belanja Modal.

2.3 Kerangka Pemikiran

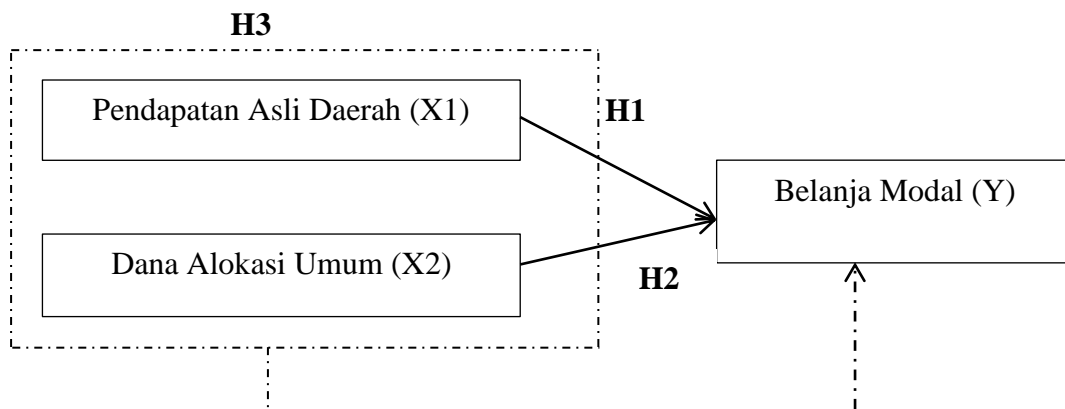
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di alokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber pendapatan tersebut merupakan sumber belanja, termaksud belanja modal.

Meningkat atau menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) akan berdampak pada belanja modal, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun

anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja fisik lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka di kembangkan kerangka berpikir sebagai berikut seperti terlihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Keterangan :

—————> : Pengaruh secara parsial

- - - - -> : Pengaruh secara simultan

Sumber : Konsep yang disesuaikan untuk penelitian (2021)

2.4 Hipotesis

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Menurut Arikunto (2013), Hipotesis adalah asumsi atau perkiraan atau dugaan sementara tentang rumusan masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan data atau informasi yang diperoleh dari hasil

penelitian. Menurut Sugiyono (2017), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.

Berdasarkan pada kajian teori dan penelitian yang relevan yang telah dikemukakan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 :Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Provinsi Kepulauan Riau periode 2015-2020
- H2 :Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Provinsi Kepulauan Riau periode 2015-2020
- H3 :Diduga Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal Provinsi Kepulauan Riau Periode 2015-2020.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1	Rachmawati Meita (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan “Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal”, tidak terdukung.
2	Febdwi Suryani (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum	Hasil uji hipotesis kedua maka hasil penelitian ini menyatakan maka H0

		Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau	ditolak dan H2 diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada kabupaten/ kota di Provinsi Riau.
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
3	Rachmawati A. Rifai (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsisulawesi Tengah	Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil secara simultan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
4	Suyitno et al. (2020)	<i>The Effect of Local Own Revenue and General Allocation Funds on Capital Expenditures in East Java, Indonesia</i>	Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal di Jawa Timur. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi pendapatan suatu daerah maka semakin tinggi alokasi anggaran untuk pembangunan daerah, yang membuat daerah tersebut semakin maju. Sedangkan dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah memiliki hubungan negatif yang signifikan. Hal ini menjelaskan bahwa kabupaten-kabupaten di Jawa Timur tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat.

			Sehingga perlakuan dana alokasi umum dapat dialokasikan berdasarkan konsep kesenjangan fiskal masing-masing daerah.
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
5	Mulyani (2015)	<i>The Relationship of Local Own Revenues and General Fund Allocation on Capital Expenditure of Local Government</i>	Terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dengan belanja modal pada pemerintah daerah di seluruh provinsi Jawa Barat tahun 2015 tahun fiskal.

Sumber : Olahan Data Peneliti (2022)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk-bentuk angka, meskipun juga berupa data kualitatif sebagai pendukungnya. Seperti kata-kata atau kalimat yang tersusun dalam angket, kalimat hasil konsultasi atau wawancara antara peneliti dan informan. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. (Sugiyono, 2012).

3.2. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penulisan ini menggunakan dua jenis data yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Menurut Sugiyono (2015), data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pihak pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mengerti tentang pengelolaan anggaran.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini berupa data realisasi PAD, DAU, dan belanja modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Periode 2015-2020.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut:

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi menurut Sugiyono (2015), metode dokumentasi yaitu proses pengumpulan dokumen yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan mengambil data terkait realisasi PAD, DAU, dan belanja modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode 2015-2020.

2. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

3.4. Definisi Operasional

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu :

1. Variabel bebas (*independent variable*)

Variabel ini sering disebut variabel *stimulus, prediktor, antecedent*.

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2012). Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendapatan Asli Daerah (X1)
- b. Dana Alokasi Umum (X2)

2. Variabel terikat (*dependent variable*)

Variabel ini sering disebut variabel *output, kriteria, konsekuen*.

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012). Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Belanja Modal (Y).

Untuk menghindari pengertian yang berbeda-beda dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Belanja Modal (Y)	Pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PP No. 24 Tahun 2005). (Halim, 2012)	Realisasi belanja modal di dalam LRA. (Kosim, 2017)	Rasio

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
2	Pendapatan Asli Daerah (X1)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (UUD Nomor 33 tahun 2004). (Halim, 2012)	1. Besarnya jumlah realisasi PAD yang diperoleh daerah yang berasal dari : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan 3. Lain-lain PAD yang sah (Kosim, 2017)	Rasio
3	Dana Alokasi Umum (X2)	Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi” (Halim, 2012)	Besarnya jumlah DAU yang diberikan pemerintah pusat berdasarkan PP RI No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. (Kosim, 2017)	Rasio

Sumber: Data skunder yang diolah (2021)

3.5. Metode Analisa Data

Menurut (Rumengan, 2010) teknik analisis data merupakan sub bab yang mengemukakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang bias dan relevan yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan program SPSS 24.

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu membuat analisis deskriptif kuantitatif

dan analisis regresi. Menurut Wijaya (2013) analisis deskriptif merupakan pengumpulan, penyusunan dan penyajian ringkasan data penelitian yang diringkas dengan baik dan teratur baik dalam bentuk tabel atau presentasi grafik, nilai rata-rata, deviasi standart sebagai dasar untuk berbagai pengambilan keputusan. Analisis berupa penyajian data dengan tabel maupun distribusi frekuensi, grafik garis maupun batang.

Untuk mencari keterkaitan antara variabel-variabel pada model dalam penelitian ini, data yang terkumpul akan dianalisis dengan regresi linear untuk analisis *variable dependent* dipengaruhi oleh *variable independent*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang terbagi dari uji *multikolinearitas*, uji *heterokedastisitas* dan uji *normalitas*, dan ada juga uji analisis linear berganda serta juga menggunakan uji hipotesis yaitu uji t (uji secara parsial), uji F (uji secara simultan) dan uji koefisien determinasi.

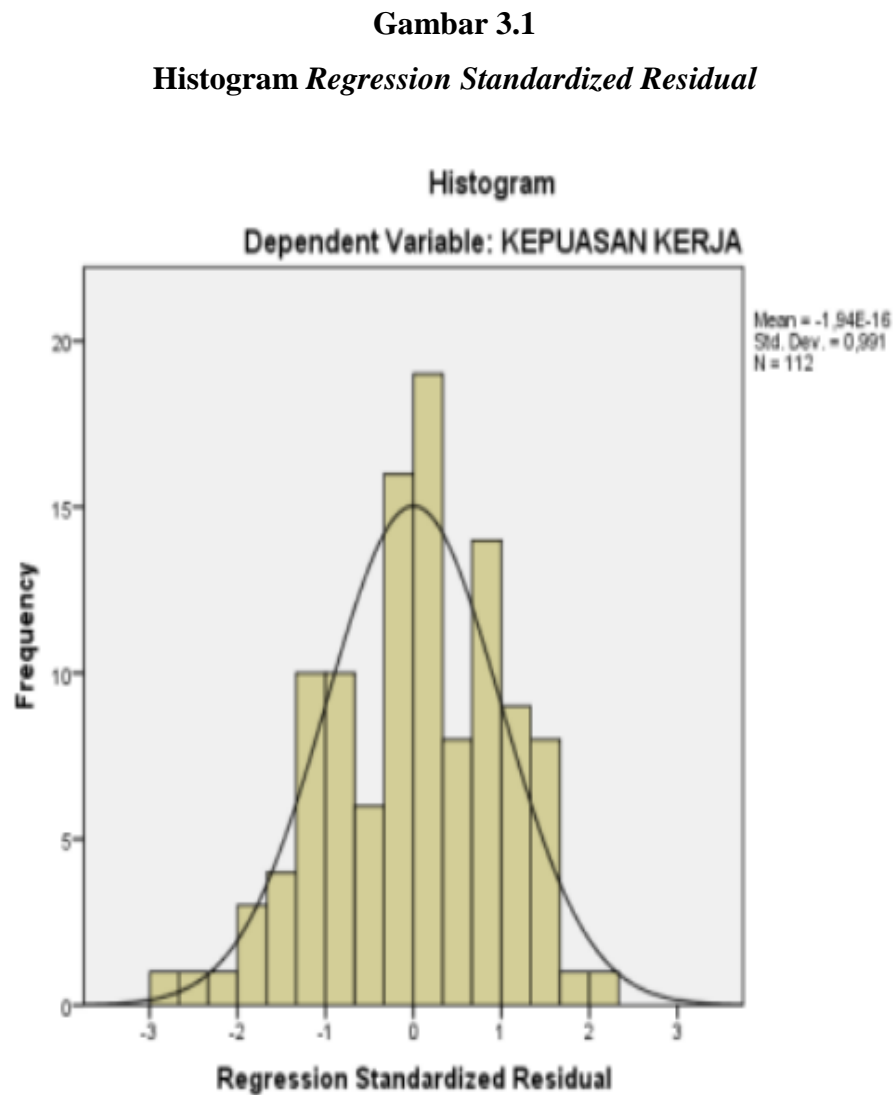
3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Untuk meyakinkan bahwa persamaan garis regresi yang diperoleh adalah linier dan dapat dipergunakan (valid) untuk mencari peramalan, maka akan dilakukan pengujian asumsi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

3.6.1.1 Uji Normalitas

Menurut Prayitno (2012) uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik normal P-P

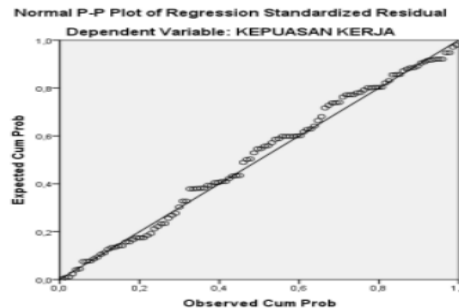
Plot of regression standardized residual atau dengan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Sebagaimana pada gambar berikut:



Sumber: (Polii 2015)

Jika grafik histogram berbentuk seperti lonceng maka data berdistribusi normal, kemudian untuk grafik normal P-P Plot dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.2
Grafik Normal P-P Plot Of Regression Standardized Residual



Sumber: (Polii 2015)

Analisis P-P Plot dikatakan normal jika terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal. Menurut Prayitn (2013) dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka data berdistribusi normal.
2. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka data tidak berdistribusi normal.

3.6.1.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Prayitno (2013) Multikolinearitas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antar variable independen dalam model regresi. Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variable independen dalam model regresi.

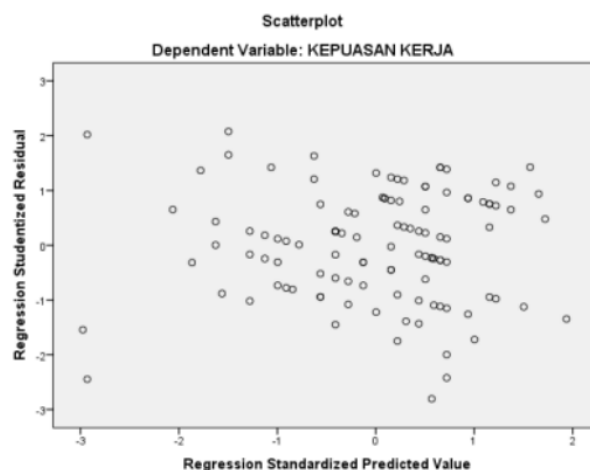
Menurut Ghozali (Prayitno, 2013) dalam penelitian ini teknik untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*, apabila nilai VIF dibawah 10 dan nilai *Tolerance* besarnya lebih dari 0.1, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

3.6.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Prayitno (2013) uji heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Menurut Sunyoto (2011) jika residualnya mempunyai varians yang sama, disebut terjadi homoskedastisitas, dan jika variansnya tidak sama atau berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas.

Analisis uji asumsi klasik heteroskedastisitas hasil output SPSS melalui grafik scatterplot antara Z prediction (ZPRED) yang merupakan variable bebas (sumbu X=Y hasil prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variable terikat (sumbu Y=Y prediksi – Y rill). Sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar 3.3
Uji Heteroskedastisitas



Sumber: (Polii 2015)

Jika ada titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada

sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Menurut Sunyoto (2011) cara menganalisisnya yaitu sebagai berikut :

1. Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar di bawah ataupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur.
2. Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titik mempunyai pola yang teratur, baik yang menyempit, melebar maupun bergelombang.

3.6.1.4 Uji Autokorelasi

Menurut Prayitno (2013), Auto korelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji auto korelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah ada tidaknya auto korelasi pada model regresi. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah auto korelasi. Metode pengujian menggunakan uji *Durbin-Watson (DW test)*.

Menurut Prayitno (2013) metode pengujian menggunakan *Durbin Watson* (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Angka $DW < - 2$ berarti ada autokorelasi yang positif.
- b. Angka $DW - 2$ sampai dengan $+ 2$ berarti tidak ada autokorelasi.
- c. Angka $DW > + 2$ berarti ada autokorelasi yang negatif.

3.6.2 Uji Regresi Linier Berganda

Setelah melakukan uji asumsi klasik lalu menganalisis dengan metode regresi linear sederhana dengan alasan variabel bebas terdiri dari beberapa variabel. Berdasarkan hubungan dua variabel yang dinyatakan dengan persamaan linear dapat digunakan untuk membuat prediksi (ramalan) tentang besarnya nilai Y (variabel *dependent*) berdasarkan nilai X tertentu (Variabel *independent*). Ramalan (prediksi) tersebut akan menjadi lebih baik bila kita tidak hanya memperhatikan satu variabel yang mempengaruhi (variabel *independent*) sehingga menggunakan analisis regresi linear sederhana. Adapun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut (Prayitno, 2012)

Persamaan Regresi Linear Sederhana,

$$Y = \alpha + \beta_1 X + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

Y = Belanja Modal

X1 = Pendapatan Asli Daerah

X2 = Dana Alokasi Umum

α = Konstanta

β_1 , = Koefisien masing-masing variabel

e = Kesalahan estimasi standar

3.6.3. Uji Hipotesis

3.6.3.1 Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji statistik t disebut juga uji signifikan individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel

dependen. Pada akhirnya akan diambil suatu kesimpulan H_0 ditolak atau H_a diterima dari hipotesis yang telah dirumuskan.

Hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

Uji hipotesis *two tailed* positif

H_0 ditolak: jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau jika $\alpha < 5\%$

H_0 diterima: jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau jika $-t_{hitung} > -t_{tabel}$, atau jika $\alpha > 5\%$

Apabila H_0 diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dinilai tidak signifikan dan sebaliknya apabila H_0 ditolak, maka hal ini diartikan bahwa berpengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dinilai berpengaruh secara signifikan. Adapun rancangan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) $H_0: \rho_{yx1} = 0$: Tidak terdapat pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

$H_a: \rho_{yx1} \neq 0$: Terdapat pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

2) $H_0: \rho_{yx2} = 0$: Tidak terdapat pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

$H_a: \rho_{yx2} \neq 0$: Terdapat pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

3.6.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F untuk mengetahui semua variabel independen maupun menjelaskan variabel dependennya, maka dilakukan uji hipotesis secara simultan dengan menggunakan uji statistik F.

Setelah mendapatkan nilai F_{hitung} ini, kemudian dibandingkan n dengan nilai F_{tabel} dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 atau 5%. Adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

Ho ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

Ho diterima jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$

Jika angka signifikan $\geq 0,05$, maka Ho tidak ditolak.

Jika angka signifikan $< 0,05$, maka Ho ditolak

Kemudian akan diketahui hipotesis dalam penelitian ini secara simultan ditolak atau tidak, adapun hipotesis secara simultan adalah:

1) Ho: $\rho_{yxi1-2} = 0$: Tidak terdapat pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal.

Ha: $\rho_{yxi1-2} \neq 0$: Terdapat pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal

Bila Ho diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dinyatakan tidak signifikan dan sebaliknya jika Ho ditolak menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dinyatakan signifikan.

3.6.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variable bebas terhadap variable tidak bebas. Bila koefisien determinasi $r=0$, berarti variable bebas tidak mempunyai pengaruh sama sekali (= 0%) terhadap variable tidak bebas. Sebaliknya, jika koefisien determinasi $r^2=1$, berarti variable tidak bebas 100% dipengaruhi oleh variable bebas. Karena itu letak r^2 berada dalam selang (interval) antara 0 dan 1, secara aljabar dinyatakan $0 \leq r^2 \leq 1$. r^2 secara sederhana merupakan suatu ukuran kemajuan ditinjau dari sudut pengurangan kesalahan total (total error). r^2 menunjukkan pengurangan atas kesalahan total ketika di plot sebuah garis regresi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Syam Kusufi 2012. Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi. *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi*.
- Arief, M.Z. 2018. PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. *Jurnal Jendela Hukum*, 2(1): 57–67.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Felix, O. 2012. Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government system of Ondo State, Nigeria. *Journal of Accounting and Taxation*, 4.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat*.
- Halim, A. & Kusufi, S. 2017. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi*.
- Harahap, R.U. 2011. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara.
- Jolianis 2016. Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Economic and Economic Education*, Vol.4.
- Kosim, E. 2017. PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KOTA BANJAR. *Journal of Management Review*.
- Kusuma, H. 2013. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif*.
- Mardiasmo 2018. *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Mawarni 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh).

Polii, L.R.G. 2015. Analisis Keterikatan Karyawan Terhadap Pekerjaan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Dan Turnover Intentions Karyawan Di Rumah Sakit Siloam Manado. *EMBA*, 3(4): 179–181.

Prayitno, D. 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis Data Dengan SPSS 20 Edisi Ke Satu*. Yogyakarta: Andi.

Prayitno, D. 2013. *Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate Dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.

Rumengan, J. 2010. *Metodologi Penelitian Dengan SPSS*. Batam: UNIBA Press.

Sugiyono 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono 2015. *Metode Penelitian (MixMethods)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono 2017. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sunyoto, D. 2011. *Metode Penelitian Ekonomi, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: CAPS.

Wijaya, T. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yustikasari 2012. Pengaruh Dau, Dak, Pad, Dan Pdrb Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia.

Curriculum Vitae

A. Data Pribadi

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Status :
Agama :
E-mail :
Alamat :

B. Riwayat Pendidikan

Tingkat Sekolah	Nama Sekolah
Taman Kanak-kanak	
Sekolah Dasar	
Sekolah Menengah Pertama	
Sekolah Menengah Atas	